

# KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DESA EKAS BUANA LOMBOK TIMUR DENGAN KONSEP VALUE FOR MONEY

Anak Agung Gede Swadana Kumara Putra<sup>1</sup>

[gungswa1403@gmail.com](mailto:gungswa1403@gmail.com)

<sup>1</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Rr Sri Pancawati<sup>2</sup>

[pancawati@unram.ac.id](mailto:pancawati@unram.ac.id)

<sup>2</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

Iman Waskito<sup>3</sup>

[waskitoiman@unram.ac.id](mailto:waskitoiman@unram.ac.id)

<sup>3</sup>Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mataram

## ABSTRAK

Sektor publik saat ini menjadi pusat perhatian pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan mengembangkan model otonomi daerah yang berkeadilan. Termasuk sektor publik kategori terkecil yaitu desa. Sektor publik selalu dituntut untuk melaporkan dana publik secara transparan. Kinerja pemerintah desa dapat dinilai melalui laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam mewujudkan *good governance*. Pengukuran kinerja sektor publik menggunakan konsep *value for money* yaitu pengukuran kinerja sektor publik berdasarkan pada segi ekonomi, efisien dan efektivitas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan pengukuran *value for money* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana Lombok Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kuantitatif dengan pendekatan studi kasus jenis *configurative-ideographic studies*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana belum optimal dan harus terus ditingkatkan. Dari segi ekonomi pada tahun 2019 dan 2021 mendapatkan hasil cukup ekonomis dan tahun 2020 mendapat hasil kurang ekonomis. Dari segi efisiensi mendapatkan hasil efisien untuk tahun 2020 dan 2021, cukup efisien untuk tahun 2019. Dari segi efektivitas pada tahun 2019 mendapat hasil efektif, tahun 2020 mendapat hasil kurang efektif dan 2021 mendapat hasil cukup efektif.

**Kata Kunci:** Efisiensi, Efektivitas, Kinerja, Pengukuran Ekonomi, *Value For Money*.

## ABSTRACT

*The government has recently prioritized the public sector to create a prosperous society and establish a fair regional autonomy model. This includes focusing on the smallest unit of the public sector, which is the regional village. Transparency in financial reporting of the public sector is consistently demanded. The assessment of local government performance and good governance is based on the realization report of the Regional Revenues and Expenditures Budget (APBDes). The measurement of public sector performance using the concept of value for money considers the factors of economy, efficiency, and effectiveness. This study aims to examine the application of value for money measurement to evaluate the financial performance of the Ekas Buana local government in East Lombok, specifically in relation to the APBDes. This study is conducted through quantitative-descriptive method with a case study approach of the type of configurative-ideographic studies, the study indicates that the Ekas Buana local government needs improvement and is currently suboptimal. In regards to the economy, there were positive economic outcomes in 2019 and 2021, while 2020 experienced less favorable economic results. When it comes to efficiency, achieving efficient results in 2020 and 2021 demonstrates a significant improvement compared to the efficiency level in 2019. Regarding effectiveness, 2019 yielded effective results, 2020 had relatively lower effectiveness, and 2021 showcased notably effective outcomes.*

**Keywords:** Economy Measurement, Efficiency and Effectivity, Performance, *Value for Money*

## PENDAHULUAN

Sektor publik saat ini menjadi pusat perhatian pemerintah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang makmur dan mengembangkan model otonomi daerah yang berkeadilan. Menurut Mahmudi (2016) organisasi sektor publik tidak boleh diabaikan dan tidak mungkin dihapuskan keberadaannya dalam suatu negara. Semua orang membutuhkan sektor publik, sekalipun tidak berkecimpung di dalamnya akan tetap membutuhkan sektor publik. Dalam menjalankan organisasi sektor publik tentu sangat perlu pengelolaan yang baik dengan menerapkan praktek akuntansi di dalamnya. Akuntansi di dalam pemerintahan perlu diperhatikan dalam perencanaan dan pengendalian anggaran di hadapan publik.

Pelaksanaan akuntabilitas untuk mengelola anggaran dalam sektor publik yang telah diberikan menjadi salah satu aspek yang penting dalam sektor publik. Menurut Mardiasmo (2018) anggaran publik berisi rencana yang dipresentasikan dalam bentuk rencana perolehan pendapatan dan belanja dalam suatu moneter. Setiap pemerintah desa harus memperhatikan anggaran desa sebagai informasi berupa laporan keuangan agar dapat membuat rencana tindakan yang akan dilakukan oleh pemerintah di masa depan. Dalam menjalankan pembangunan ataupun seluruh kegiatan Desa, Pemerintah Desa akan melaksanakan pengelolaan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di setiap kegiatan untuk kepentingan desa sebagai upaya untuk mensejahterakan masyarakat desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan sesuatu rencana keuangan desa tahunan yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah desa dan BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan diatur dengan peraturan desa (Umami & Widodo, 2021). Setiap desa akan diberikan kebebasan oleh Pemerintah dalam menjalankan kewajibannya untuk memenuhi harapan dari masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan. Dalam memenuhi harapan dari masyarakat, Pemerintah Desa harus mempertanggungjawabkan kinerja yang dilakukan dengan memberikan pelayanan publik yang baik.

Penilaian kinerja pemerintah desa dapat dilihat melalui laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang menjadi patokan bagi pemerintah desa untuk mewujudkan *good governance*. Pengukuran kinerja keuangan dapat dilakukan dengan banyak cara yaitu *Balance Scorecard (BSC)*, *Performance Pyramid System (PPS)*, *The Tableau De Bord (TdB)*, *Productivity Measurement and Enhancement System (ProMES)*, *Sink and Tuttle*, *Theory of Constrains* dan *Value for Money*. Pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang pedoman teknis pengelolaan keuangan daerah, pada peraturan tersebut dijelaskan bahwa dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah dilakukan secara efisien, ekonomis dan efektif. Aspek efisien, ekonomi dan efektif ini termuat di dalam pengukuran kinerja keuangan dengan metode *value for money*.

Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* adalah konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama, yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Penilaian kinerja keuangan sektor publik menggunakan *value for money* ini dapat tercapai secara maksimal apabila dalam penggunaan biaya masukan (*input*) paling kecil untuk mencapai suatu keluaran (*output*) yang optimal dalam pencapaian tujuan suatu organisasi atau sektor publik. Pengelolaan keuangan menggunakan metode *value for money* ini cenderung berorientasi pada kemampuan pemerintah untuk melaksanakan kebijakan dalam program – program yang telah disusun. Tujuan pengukuran kinerja *value for money* yaitu, ekonomis dalam

alokasi dan pengadaan sumber daya, efisien dalam menggunakan sumber daya, dan efektif sesuai dengan tujuan (Ardani et al., 2022).

Desa Ekas Buana yang dijadikan objek dalam penelitian ini merupakan desa yang memiliki potensi wilayah yang sangat besar. Desa Ekas Buana ini memang dikatakan Desa yang memiliki wilayah tidak terlalu luas tetapi memiliki banyak keindahan alam seperti Pantai Ekas, Pantai Kura – Kura, Pantai Surga dan Pantai Planet, potensi alam yang ada di Desa Ekas Buana ini memberikan mata pencaharian murni kepada penduduk desa setempat dengan budidaya rumput laut, lobster maupun mata pencaharian sebagai nelayan. Desa Ekas Buana dengan banyak keindahan alam yang dimiliki juga memiliki fasilitas bagi para wisatawan mancanegara dan lokal seperti penginapan, resort maupun villa.

Ada beberapa penelitian terdahulu yang meneliti bagaimana kinerja keuangan Pemerintah Desa menggunakan konsep *value for money*. *Value for money* mengukur kinerja keuangan organisasi sektor publik berdasar pada 3 pengukuran yaitu pengukuran ekonomis, efisiensi dan efektivitas. Pada pengukuran tingkat ekonomis penelitian yang dilakukan oleh Seran (2021) dan Putra & Wirawati (2015) mendapatkan hasil pengukuran ekonomis yaitu sangat ekonomis, pada penelitian yang dilakukan oleh Wuryanto Putri & Susliyanti (2019) dan Hadaryen & Sugiartono (2021) mendapatkan hasil pengukuran yaitu ekonomis dan pada penelitian yang dilakukan oleh Umami & Widodo (2021) mendapatkan hasil cukup ekonomis, dari hasil pengukuran ekonomis tersebut dapat disimpulkan pengukuran menggunakan rasio ekonomis hasilnya dapat berbeda – beda. Pada pengukuran rasio efisiensi penelitian yang dilakukan oleh Wuryanto Putri & Susliyanti (2019) dan Hadaryen & Sugiartono (2021) mendapatkan hasil pengukuran efisiensi yaitu efisien, pada penelitian yang dilakukan oleh Putra & Wirawati (2015) mendapatkan hasil yang sangat efisien, penelitian yang dilakukan oleh Umami & Widodo (2021) mendapatkan hasil cukup efisien dan pada penelitian yang dilakukan oleh Seran (2021) mendapatkan hasil yang tidak efisien, dari hasil pengukuran efisiensi tersebut dapat disimpulkan pengukuran menggunakan rasio efisiensi hasilnya dapat berbeda – beda. Pada pengukuran yang menggunakan rasio efektivitas, penelitian yang dilakukan oleh Seran (2021), Hadaryen & Sugiartono (2021), Umami & Widodo (2021), Putra & Wirawati (2015) mendapatkan hasil pengukuran rasio efektivitas yaitu sangat efektif sedangkan pada penelitian yang dilakukan oleh Wuryanto Putri & Susliyanti (2019) mendapatkan hasil cukup efektif, dari hasil pengukuran efektivitas tersebut dapat disimpulkan pengukuran menggunakan rasio efektivitas mendapatkan hasil yang berbeda – beda.

Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui penerapan pengukuran *value for money* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana Lombok Timur.

## TINJAUAN LITERATUR

### Teori *Stakeholder*

Teori *stakeholder* adalah sebuah konsep manajemen strategis yang tujuannya adalah untuk membantu korporasi memperkuat hubungan dengan kelompok eksternal. Teori *stakeholder* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang mengutamakan kepentingannya sendiri tetapi harus memberikan manfaat bagi *stakeholder*-nya. Dengan demikian, keberadaan perusahaan sangat bergantung kepada dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*-nya (Isnaini et al., 2021).

Berdasarkan definisi teori *stakeholder* tersebut dapat disimpulkan bahwa teori *stakeholder* menyatakan bahwa perusahaan bukanlah sebuah entitas yang aktivitasnya hanya untuk kepentingan sendiri, namun juga harus memberikan manfaat bagi para *stakeholder* yang ikut berkontribusi di dalam perusahaan (Susadi & Kholmi, 2021). Oleh karena itu tanggung jawab perusahaan yang semula hanya diukur dari sebatas indikator ekonomi saja, harus memiliki cakupan lebih luas dengan memperhitungkan faktor-faktor sosial, baik internal maupun eksternal perusahaan, karena kelangsungan hidup perusahaan tergantung pada dukungan dari para *stakeholder*-nya (Yanti et al., 2021).

Implikasi teori *stakeholder* dalam penelitian ini adalah Pemerintah Desa Ekas Buana sebagai organisasi sektor publik yang mempunyai tanggung jawab yang tidak hanya kepada kepala desa namun juga kepada seluruh perangkat desa dan masyarakat desa. Teori *stakeholder* ini mencakup seluruh elemen yang ada di desa untuk melakukan tanggung jawabnya dengan baik dimana dalam hal ini lebih ditekankan kepada pemerintah desa untuk melakukan pelayanan publik dengan baik kepada masyarakat.

### **Pengertian Kinerja**

Kinerja merupakan hasil kerja yang telah dicapai oleh pegawai dalam menjalankan tugas dan pekerjaan yang berasal dari organisasi. Kinerja juga dapat diartikan sebagai hasil kerja yang dihasilkan oleh individu melalui proses yang diberikan oleh organisasi atau perusahaan yang dapat diukur secara konkrit sesuai dengan standar yang telah ditentukan oleh organisasi atau perusahaan (Seran, 2021).

### **Penilaian Kinerja**

Menurut Mardiasmo (2018) penilaian kinerja merupakan bagian penting dari sebuah sistem pengendalian organisasi sektor publik. Penilaian kinerja penting dilakukan agar dapat mengetahui seberapa tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi sektor publik dalam mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan.

### **Pengertian *Value for Money***

Menurut Mardiasmo (2018) *value for money* merupakan konsep pengelolaan organisasi sektor publik yang mendasarkan pada tiga elemen utama yaitu ekonomi, efisien, dan efektivitas. Ekonomi merupakan pemerolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan. Efektivitas adalah pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan. Efektivitas merupakan perbandingan antara *outcome* dan *output*.

### **Desa**

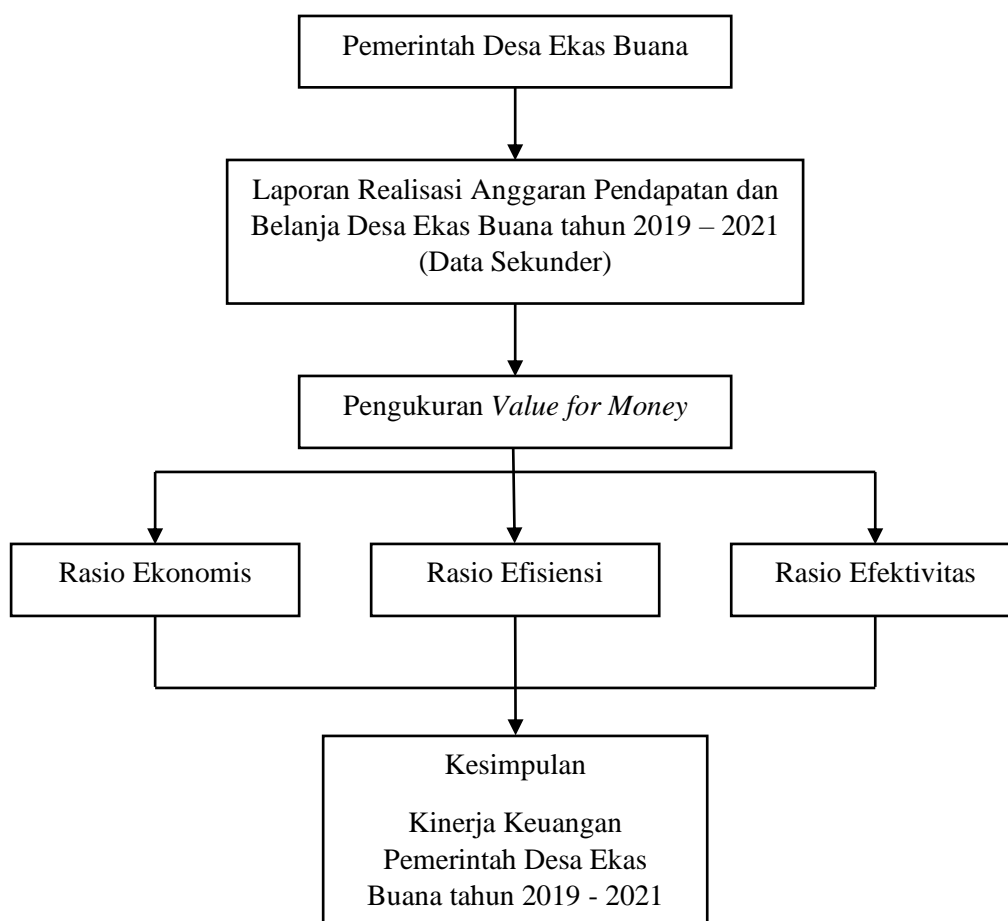
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 1, Desa adalah Desa dan adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) adalah rencana sumber dan alokasi penggunaan dana desa untuk mencapai sebuah tujuan yang diinginkan dan dicapai dalam jangka waktu tertentu (Daud Soeharso, 2017). APBDes merupakan bentuk tanggung jawab dari pemerintah desa kepada masyarakat melalui kebijakan – kebijakan yang dibiayai oleh APBDes selama satu tahun anggaran (IK Winaya, 2017).

## Kerangka Konseptual

Untuk memperjelas konsep pemikiran pada permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, adapun kerangka konseptual yang dapat digambarkan sebagai berikut:



**Gambar 1. Kerangka Konseptual**

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kuantitatif. Metode deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku umum (Sugiyono, 2017).

Penelitian ini dilakukan di Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur. Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder

dalam penelitian ini berupa data kuantitatif yaitu pada Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Ekas Buana Lombok Timur tahun 2019 – 2021 dan pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi.

Pada penelitian ini untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana dilakukan dengan metode *value for money* yang mengukur rasio ekonomi, efisien dan efektivitas. Prosedur analisis data yang dilakukan antara lain:

1. Tahap pengumpulan data, data berupa dokumen – dokumen berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ekas Buana, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur tahun 2019 – 2021.
2. Analisis rasio dilakukan pada hasil data yang telah diperoleh dengan berdasarkan pada konsep *value for money*. Analisis rasio dilakukan sebagai berikut:

1) Rasio Ekonomi,

Rasio ekonomi dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Ekonomi} = \frac{\text{input}}{\text{nilai input}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2015:111)

Keterangan:

*Input* : Realisasi Anggaran Belanja Desa Ekas Buana (dalam rupiah)

Nilai *input* : Anggaran Belanja Desa Ekas Buana (dalam rupiah)

Klasifikasi dalam pengukuran rasio ekonomi:

**Tabel 1. Klasifikasi Pengukuran Rasio Ekonomi**

Persentase	Kriteria
> 100%	Ekonomis
85% - 100%	Cukup Ekonomis
65% - 84%	Kurang Ekonomis
< 65%	Tidak Ekonomis

Sumber: Mahmudi (2015:111)

2) Rasio Efisiensi

Rasio efisiensi dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{output}}{\text{input}} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2015:111)

Keterangan:

*Output* : Realisasi Anggaran Belanja Desa Ekas Buana (dalam rupiah)

*Input* : Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Ekas Buana (dalam rupiah)

Klasifikasi dalam pengukuran rasio efisiensi:

**Tabel 2. Klasifikasi Pengukuran Rasio Efisiensi**

Persentase	Kriteria
< 90%	Sangat Efisien
90% - 99%	Efisien
100%	Cukup Efisien
> 100%	Tidak Efisien

Sumber : Mahmudi (2015:111)

3) Rasio Efektivitas

Rasio efisiensi dapat diukur dengan rumus sebagai berikut:

$$Efektivitas = \frac{outcome}{output} \times 100\%$$

Sumber : Mahmudi (2015:111)

Keterangan:

*Outcome* : Realisasi Anggaran Pendapatan Desa Ekas Buana (dalam rupiah)

*Output* : Anggaran Pendapatan Desa Ekas Buana (dalam rupiah)

Klasifikasi dalam pengukuran rasio efektivitas:

**Tabel 3. Klasifikasi Pengukuran Rasio Efektivitas**

Persentase	Kriteria
≥ 100%	Efektif
85% - 99%	Cukup Efektif
65% - 84%	Kurang Efektif
≤ 65%	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi (2015:111)

- Menarik kesimpulan, setelah melakukan pengukuran rasio pada rasio ekonomis, efisiensi dan efektivitas, hasil yang telah didapatkan dibahas mengenai penetapan kinerja keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana dan menarik kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Deskripsi Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah laporan berupa laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ekas Buana Kecamatan Jerowaru Kabupaten Lombok Timur dalam periode anggaran tahun 2019 – 2021 yang digunakan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana.

**Tabel 4. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ekas Buana Tahun 2019-2021**

Tahun	Keterangan	Anggaran	Realisasi
2019	Pendapatan	1,883,705,949.00	1,883,705,949.00
	Belanja	1,883,705,949.00	1,883,705,949.00
2020	Pendapatan	1,657,542,940.00	1,214,941,036.00
	Belanja	1,657,542,940.00	1,145,745,336.00
2021	Pendapatan	1,777,125,417.00	1,776,293,736.00
	Belanja	1,802,621,773.00	1,775,139,035.00

Sumber: LRA Desa Ekas Buana tahun 2019 – 2021 (data diolah)

Pengukuran yang dilakukan untuk menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana yaitu pengukuran *value for money* yaitu pengukuran dengan rasio ekonomis, rasio efisiensi dan rasio efektivitas.

#### Analisis Data

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi 2019} &= \frac{\text{Rp. 1.883.705.949}}{\text{Rp. 1.883.705.949}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi 2020} &= \frac{\text{Rp. 1.145.745.336}}{\text{Rp. 1.657.542.940}} \times 100\% \\ &= 69,12\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Ekonomi 2021} &= \frac{\text{Rp. 1.775.139.035}}{\text{Rp. 1.802.621.773}} \times 100\% \\ &= 98,48\% \end{aligned}$$

**Tabel 5. Hasil Pengukuran Ekonomi**

Tahun	Hasil Persentase (%)
2019	100%
2020	69,12%
2021	98,48%

Sumber: Peneliti (2023), data diolah

#### Hasil Pengukuran Efisiensi

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2019} &= \frac{\text{Rp. 1.883.705.949}}{\text{Rp. 1.883.705.949}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2020} &= \frac{\text{Rp. 1.145.745.336}}{\text{Rp. 1.214.941.036}} \times 100\% \\ &= 94,30\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi 2021} &= \frac{\text{Rp. 1.775.139.035}}{\text{Rp. 1.776.293.736}} \times 100\% \\ &= 99,93\% \end{aligned}$$



**Tabel 6. Hasil Pengukuran Efisiensi**

Tahun	Hasil Persentase (%)
2019	100%
2020	94,30%
2021	99,93%

Sumber: Peneliti (2023), data diolah

### Hasil Pengukuran Efektivitas

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas 2019} &= \frac{\text{Rp. 1.883.705.949}}{\text{Rp. 1.883.705.949}} \times 100\% \\ &= 100\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas 2020} &= \frac{\text{Rp. 1.214.941.036}}{\text{Rp. 1.657.542.940}} \times 100\% \\ &= 73,30\% \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Efektivitas 2021} &= \frac{\text{Rp. 1.776.293.736}}{\text{Rp. 1.777.125.417}} \times 100\% \\ &= 99,95\% \end{aligned}$$

**Tabel 7. Hasil Pengukuran Efektivitas**

Tahun	Hasil Persentase (%)
2019	100%
2020	73,30%
2021	99,95%

Sumber: Peneliti (2023), data diolah

Berdasar hasil pengukuran kinerja keuangan berdasar prinsip *value for money* pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dalam menilai kinerja keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana selama tiga tahun anggaran yaitu 2019–2021, kemudian dilakukan interpretasi data sebagai berikut:

Pengukuran *value for money* dari segi ekonomi untuk tiga tahun anggaran tahun 2019 – 2021 kinerja keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana dalam kategori cukup ekonomis untuk tahun 2019 dan 2021, kategori kurang ekonomis untuk tahun 2020. Pada tahun 2019 menunjukkan persentase hasil pengukuran sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 69,12% dan tahun 2021 sebesar 98,48%. Hasil pengukuran segi ekonomis mengalami keadaan fluktuasi, dimana pada tahun 2020 mengalami penurunan penyerapan anggaran akibat pandemi *covid-19*. Penurunan pada tahun 2020 ini diakibatkan oleh pemerintah desa harus melakukan *refocusing* untuk penanganan penyebaran *covid-19* ini dengan cara mengalihkan langsung anggaran dana desa tanpa melakukan perencanaan ulang. Pengukuran segi ekonomi jika semakin besar persentase ekonomis maka semakin baik dalam meminimalisir *input* primer yaitu anggaran menjadi *input* sekunder yaitu tenaga kerja, bahan dan infrastruktur dalam melaksanakan kegiatan sehingga dapat menghindari pengeluaran yang tidak produktif.

Pengukuran *value for money* dari segi efisiensi untuk tiga tahun anggaran tahun 2019 – 2021 kinerja keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana dikatakan dalam kategori cukup efisien

untuk tahun 2019 dan kategori efisien untuk tahun 2020 dan 2021. Pada tahun 2019 hasil persentase sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 94,30% dan tahun 2021 sebesar 99,93%. Hasil tersebut dapat terjadi karena kurangnya perencanaan dan pengendalian pada belanja dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan desa. Perbaikan dari segi efisien dapat dilakukan dengan meningkatkan *output* dengan tingkat *input* yang sama atau bisa dengan meningkatkan pemerolehan *output* berdasar pada proporsi yang lebih besar dibanding dengan proporsi peningkatan *input*.

Pengukuran *value for money* dari segi efektivitas untuk tiga tahun anggaran tahun 2019–2021 kinerja keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana dikatakan dalam kategori efektif pada tahun 2019, kurang efektif pada tahun 2020 dan cukup efektif pada tahun 2021. Pada tahun 2019 mendapatkan persentase hasil pengukuran sebesar 100%, tahun 2020 mendapatkan hasil pengukuran sebesar 73,30% dan tahun 2021 sebesar 99,95%. Selama tiga tahun pengukuran dari segi efektivitas mengalami keadaan fluktuasi, keadaan seperti ini tentunya harus menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah desa agar dapat mengelola keuangan desa lebih konsisten dalam penggunaannya. Penurunan yang terjadi pada tahun 2020 juga diakibatkan oleh pengelolaan dana yang sebagian besar untuk penanggulangan *covid-19*. Pemerintah desa pada tahun 2020 melakukan *refocusing* anggaran untuk penanganan penyebaran *covid-19* ini dengan cara mengalihkan langsung anggaran dana desa tanpa melakukan perencanaan ulang anggaran atau merancang ulang alokasi anggaran karena penanganan *covid-19* ini harus dilakukan secepat mungkin.

## **KESIMPULAN**

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan Pemerintah Desa Ekas Buana dari segi ekonomis selama tiga tahun pengukuran 2019 – 2021 berada dalam keadaan fluktuasi atau keadaan naik turun, dimana pada tahun 2019 dan 2021 termasuk kategori cukup ekonomis, sedangkan pada tahun 2020 termasuk dalam kategori kurang ekonomis. Walaupun pada tahun 2020 mendapatkan hasil pengukuran yang sangat turun dari tahun 2019, pada tahun berikutnya sudah mengalami perbaikan dengan mengalami kenaikan. Segi efisien selama tiga tahun pengukuran 2019 – 2021 masih mengalami keadaan fluktuasi atau keadaan naik turun pada hasil klasifikasi pengukurannya. Pada tahun 2019 mendapatkan hasil cukup efisien, tahun 2020 dan 2021 mendapatkan hasil efisien. Hasil tersebut dapat terjadi karena kurangnya perencanaan dan pengendalian pada belanja dalam pembelian barang dan jasa untuk membiayai kegiatan desa. Dari segi efektivitas selama tiga tahun pengukuran 2019 – 2021 mengalami keadaan fluktuasi atau keadaan naik turun. Tahun 2019 mendapatkan hasil efektif, tahun 2020 mendapatkan hasil kurang efektif dan pada tahun 2020 mendapatkan hasil cukup efektif. Walaupun pada tahun 2020 mendapatkan hasil yang kurang efektif, pada tahun berikutnya sudah mengalami perbaikan dengan mendapatkan hasil cukup efektif.

## **REFERENSI**

- Ardani, R. R., Widianingsih, R., Purwati, A. S., & Saemilasari, M. (2022). *Analisis Value For Money Pengelolaan Dana Desa Bidang Kesehatan Desa Alas Malang*. 549–558.
- Daud Soeharso, E. (2017). Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2015 Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 Di Kecamatan Sedayu Kabupaten Bantul Yogyakarta. *Journal of Governance and Public Policy*, 4(3), 422–442. <https://doi.org/10.18196/jgpp.4384>
- Hadaryen, Y. A., & Sugiartono, E. (2021). Evaluasi Pengukuran Kinerja Pemerintah Desa Dengan Menggunakan Konsep Value For Money (Studi Kasus pada Kantor Desa

- Tembokrejo Kecamatan Gumukmas Kabupaten Jember). *Jurnal Akuntansi Terapan Dan Bisnis*, 1(2), 134–140.
- IK Winaya, I. D. Y. (2017). *Desa Membangun : Analisis Perencanaan Dan Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Tahun 2017 ( Studi Kasus di desa kategori tertinggal pada Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli )*. 1–8.
- Isnaini, N. A., Riduwan, A., & Asyik, N. F. (2021). Intellectual Capital Pada Organisasi Islam Dan Peran Akuntansi Dalam Pertanggungjawaban Kepada Stakeholder (Studi Pada Yayasan Masjid Al Falah Surabaya). *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(11), 2–22.
- Mahmudi. (2015). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi 3). Yogyakarta : Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. (2016). *Akuntansi Sektor Publik*. UII PRESS.
- Mardiasmo. (2018). *Akuntansi Sektor Publik edisi terbaru*. PENERBIT ANDI.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020*. (n.d.).
- Putra, A. P. A., & Wirawati, N. G. P. (2015). Penilaian Kinerja Berbasis Value For Money Atas Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tabanan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 11(1), 252–268.
- Seran, M. S. B. (2021). Value For Money : An Analysis of The Impact of Village Government Performance on Village Financial Management in Subun Bestobe Village. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 11(1), 140–148. <https://doi.org/10.26858/jiap.v11i1.20471>
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*.
- Susadi, M. N. Z., & Kholmi, M. (2021). Pengaruh Mekanisme Good Corporate Governance Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Pengungkapan Sustainability Report. *Jurnal Akuntansi Dan Ekonomika*, 11(1), 129–138. <https://doi.org/10.37859/jae.v11i1.2515>
- Umami, D. R., & Widodo, H. (2021). Perlakuan Akuntansi dalam Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Anggaran Dengan Konsep Value for Money. *Academia Open*, 5, 1–12. <https://doi.org/10.21070/acopen.5.2021.2192>
- Wuryanto Putri, T. W., & Susliyanti, E. D. (2019). Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Dengan Pendekatan Value For Money (Studi Pada Laporan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (Apbdes) Desa Jambidan Tahun Anggaran 2014 – 2016). *Jurnal Solusi*, 14(1), 85–102. <https://doi.org/10.51277/keb.v14i1.53>
- Yanti, N. L. E. K., Made, E. D., & Asri, P. & I. G. A. (2021). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Ukuran Dewan Komisaris, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Profitabilitas terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Kharisma*, 3(1), 43–51.